

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dibutuhkan untuk menunjang kegiatan suatu perusahaan baik yang berskala kecil maupun berskala besar (Irawan, 2012). Terdapat banyak cara mengelola SDM yang ada dalam perusahaan salah satunya adalah dengan memberikan kompensasi sesuai dengan kontribusi yang telah mereka berikan kepada perusahaan (Kristiani, 2011).

Menurut Sedarmayanti (2011:239), kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi / perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial, pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan. Kontribusi karyawan terhadap perusahaan dapat berupa aktivitas sehari-hari dimana merupakan bagian dari pekerjaan rutinnnya. Pekerjaan yang bersifat sekali-kali ini dapat berupa lembur (Kristiani, 2011).

Pada kenyataannya seringkali dalam penggajian atau pengupahan seringkali terjadi pemborosan yang menyebabkan pembengkakan biaya perusahaan yang diakibatkan karena adanya inefisiensi dan penyimpangan-penyimpangan seperti pembayaran gaji dan upah lembur kepada karyawan yang melebihi jumlah jam seharusnya (Rachman, 2010). Agar penyimpangan tidak terjadi, maka dibutuhkan suatu pengendalian internal yang baik serta sistem penggajian dan pengupahan yang memadai yang disertai dengan dokumen - dokumen atau

formulir salah satunya adalah Surat Perintah Lembur karena dapat mendorong perusahaan untuk membayarkan gaji dan upah secara tepat dan efisien (Gupitasari, 2015).

Namun, tidak semua perusahaan atau instansi pemerintah yang telah menggunakan surat perintah lembur dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran upah dan gaji lembur. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Fikri Fardian menjelaskan bahwa pada tahun 2015, Pertamina telah menggunakan surat perintah kerja lembur. Pada tanggal 26 September 2016 prokal.com juga memberitakan bahwa adanya kasus upah lembur fiktif yang terjadi di Pertamina yang melibatkan 5 orang tersangka. Modus yang dilakukan dengan memanipulasi jam kerja lembur sehingga jumlah upah lembur yang dibayarkan tidak sesuai dengan jam lembur yang dijalankan. Akibat dari adanya kasus tersebut pengeluaran di Pertamina menjadi tidak efisien.

Penelitian sebelumnya oleh Grace Katherine, 2017 tentang pengaruh penggunaan surat perintah lembur terhadap efisiensi pengeluaran gaji dan upah lembur di Pasteur Hyperpoint.

Berdasarkan dari uraian di atas tersebut dan mengacu pada penelitian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

" Pengaruh Penggunaan Surat Perintah Lembur terhadap Efisiensi Pengeluaran Gaji dan Upah Lembur pada CV. X di Bandung."

Penulis ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara hasil penelitian studi kasus di CV. X dengan penelitian sebelumnya yaitu studi kasus di Pasteur Hyperpoint.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: apakah penggunaan surat perintah lembur di perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengeluaran gaji dan upah lembur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah surat perintah lembur di perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi gaji dan upah lembur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bahwa surat perintah lembur harus tersedia dan penggunaannya harus memadai pada setiap perusahaan sehingga penyimpangan - penyimpangan yang dapat merugikan dapat dihindarkan.

2. Bagi Pihak Lain dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menambah pengetahuan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.